



## **Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Guna Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Dalam Rangka Mendukung Stabilitas Nasional**

Aprianko Suseno<sup>1</sup>, Resmanto Widodo Putro<sup>2</sup>, Rudi Andriono<sup>3</sup>

Program Studi Strategi Dan Kampanye Militer, Universitas Pertahanan RI, Jakarta, Indonesia<sup>1, 2)</sup>  
Sekolah Staf dan Komando Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Bandung, Indonesia<sup>3)</sup>

Corresponding author: [apriankosuseno@gmail.com](mailto:apriankosuseno@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemberdayaan wilayah pertahanan untuk meningkatkan kesadaran bela negara di Provinsi Jawa Timur guna menghadapi dinamika keamanan global dan ancaman non-militer seperti radikalisme, terorisme, dan ancaman siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi, regulasi, dan implementasi pemberdayaan wilayah pertahanan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung stabilitas nasional. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kodam V/Brawijaya telah melaksanakan berbagai inisiatif, seperti program Rutilahu, pengurangan stunting, dan kampanye bela negara melalui program "Satu Sekolah Satu Babinsa" dan "Kampung Pancasila". Inisiatif ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat, serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan bela negara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan wilayah pertahanan di Jawa Timur telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran bela negara dan memperkuat kohesi sosial, namun masih diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk mengoptimalkan program-program yang ada.

**Kata kunci:** Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, wilayah pertahanan Jawa Timur, Kesadaran bela negara, Pemerintah Provinsi Jawa Timur

### **Abstract**

*This research is motivated by the importance of empowering defense areas to increase awareness of state defense in East Java Province in order to face global security dynamics and non-military threats such as radicalism, terrorism, and cyber threats. This research aims to analyze the conditions, regulations, and implementation of defense area empowerment by the East Java Provincial Government in supporting national stability. The method used is descriptive analysis with a qualitative approach through interviews and literature review. The results show that the East Java Provincial Government and Kodam V/Brawijaya have implemented various initiatives, such as the Rutilahu program, stunting reduction, and the state defense campaign through the "One School One Babinsa" and "Kampung Pancasila" programs. These initiatives involve cooperation between the government, TNI, Polri, and the community, and utilize social media to spread state defense messages. The conclusion of this study is that the empowerment of defense areas in East Java has shown a positive impact in increasing state defense awareness and strengthening social cohesion, but continuous evaluation is still needed to optimize existing programs.*

**Key words:** Defense Area Empowerment, East Java defense area, State defense awareness, East Java Provincial Government



## PENDAHULUAN

Stabilitas nasional dan kesadaran bela negara merupakan dua konsep yang memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan suatu negara. Stabilitas nasional mencakup keadaan di mana sebuah negara dapat menjaga integritasnya, memelihara kedamaian dalam masyarakat, serta menjamin keamanan dan keadilan bagi seluruh warga negaranya. Di sisi lain, kesadaran bela negara mencerminkan sikap dan komitmen warga negara terhadap negara mereka, yang mencakup kesediaan untuk membela dan melindungi kepentingan negara, serta partisipasi aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan keutuhan nasional. Stabilitas nasional merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, penegakan hukum yang efektif, dan kesejahteraan sosial yang stabil. Dalam konteks global modern, stabilitas nasional tidak hanya mencakup keamanan fisik dan politik, tetapi juga mencakup stabilitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketidakstabilan di salah satu area ini dapat memicu konflik internal, ketegangan antar-etnis, kerusuhan sosial, atau bahkan ancaman dari luar yang mengancam kedaulatan negara. Kesadaran bela negara mencakup pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai, sejarah, budaya, dan kepentingan nasional suatu negara. Ini melibatkan rasa tanggung jawab moral dan patriotisme terhadap negara, serta kesediaan untuk berpartisipasi dalam menjaga dan memperkuat keutuhan negara tersebut. Kesadaran bela negara sering kali ditanamkan melalui pendidikan, budaya, dan kebijakan pemerintah yang mendorong partisipasi aktif warga negara dalam berbagai aspek kehidupan negara. Peran kesadaran bela negara dalam menjaga stabilitas nasional menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan kompleks abad ke-21, termasuk ancaman terorisme, konflik antar-negara, perubahan iklim, dan ketidakstabilan ekonomi global. Kesadaran bela negara memperkuat solidaritas sosial, identitas nasional, dan keterlibatan aktif warga negara dalam pembangunan negara mereka. Dalam konteks globalisasi yang terus berkembang, kesadaran bela negara dapat menjadi pondasi yang kuat bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatur kewajiban warga negara Indonesia (WNI) untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002, yaitu Pasal 9 ayat 1 dan 2. Pasal tersebut menyatakan bahwa upaya bela negara dilakukan dalam rangka pelaksanaan pertahanan negara, yang meliputi: pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer wajib, dinas sukarela atau pengabdian di TNI, dan pengabdian secara profesi. Namun, tidak ada upaya sistematis yang dilakukan untuk melindungi negara pada tingkat praktis. Salah satunya adalah kurangnya sistem pendidikan pertahanan negara yang komprehensif bagi generasi muda. Situasi ini dapat mempengaruhi stabilitas nasional yang erat kaitannya dengan pemberdayaan wilayah pertahanan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimplementasikan strategi pemberdayaan wilayah pertahanan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran bela negara di tingkat lokal. Di tengah dinamika kompleks dalam lingkup global dan berbagai tantangan keamanan yang terus berkembang, kesadaran bela negara menjadi pijakan krusial dalam menjaga kedaulatan dan keamanan suatu negara. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki peran sentral dalam menggerakkan kesadaran bela negara di kalangan masyarakatnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan pemahaman mendalam akan kebutuhan akan pemberdayaan wilayah pertahanan, telah mengambil langkah-langkah proaktif yang terukur untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat dan memperkuat identitas nasional melalui partisipasi dalam usaha bela negara. Melalui serangkaian program dan inisiatif yang disusun secara komprehensif, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertujuan meningkatkan kesadaran bela negara di antara warganya. Pendekatan ini mencakup penyuluhan dan edukasi yang mendalam, penguatan kerjasama antarlembaga, pembangunan infrastruktur terkait pertahanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan yang memotivasi partisipasi dalam upaya bela negara. Dengan demikian, upaya pemberdayaan wilayah pertahanan oleh Pemerintah Provinsi



Jawa Timur tidak sekadar bertujuan untuk memperkuat kekuatan militer atau infrastruktur pertahanan semata, tetapi juga merupakan bagian dari inisiatif yang lebih besar untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya peran aktif dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa.

Dinamika keamanan dan pertahanan nasional telah berubah secara dramatis sepanjang waktu. Saat ini, ancaman tidak hanya berasal dari militer, tetapi juga dari non-militer seperti radikalisme, terorisme, dan ancaman siber. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran bela negara di tingkat lokal, khususnya di wilayah Jawa Timur, membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, Jawa Timur memiliki potensi ekonomi yang sangat besar karena merupakan salah satu wilayah terbesar dan terpadat di Indonesia. Namun, potensi ini juga disertai dengan bahaya, seperti kemungkinan menjadi target berbagai jenis serangan baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan masyarakat Jawa Timur, sangat penting untuk memberdayakan wilayah pertahanan. Selain itu, membangun sinergi di antara berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat dimungkinkan oleh konsep pemberdayaan wilayah pertahanan. Kerja sama yang lebih kuat antara kedua belah pihak akan memungkinkan kampanye kesadaran bela negara yang lebih efisien dan tahan lama. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk menumbuhkan suasana yang kondusif bagi pengembangan kesadaran bela negara yang kuat di kalangan masyarakat dengan meningkatkan pemberdayaan wilayah pertahanan. Tindakan yang telah diperhitungkan ini diharapkan mampu menghadapi berbagai potensi bahaya dan kesulitan sekaligus menjamin terpeliharanya keutuhan dan kedaulatan negara.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang meliputi penelitian dan analisis data hasil wawancara dengan koresponden sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Penelitian kualitatif dimulai dengan ide yang diungkapkan dalam pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian inilah yang akan menentukan metode pengumpulan data dan analisisnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan serangkaian metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi, pandangan, dan pengalaman yang relevan terkait dengan topik penelitian. Dalam teknik analisa data, Menurut Miles dan Huberman (1984), dalam analisis data kualitatif, prosesnya dilakukan secara interaktif dan berlanjut secara kontinu hingga selesai, hingga datanya mencapai tingkat kejenuhan. Tingkat kejenuhan data ditandai dengan absennya penemuan data atau informasi baru. Kegiatan analisis melibatkan tahap reduksi data, tampilan data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kondisi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Ditemukan bahwa kondisi pemberdayaan pertahanan daerah di Jawa Timur menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Jawa Timur dan Kodam V/Brawijaya mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan ketahanan daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bela negara. Melalui berbagai inisiatif seperti menurunkan angka kemiskinan, membangun kembali rumah tidak layak huni (Rutilahu), mengurangi stunting, meningkatkan akses terhadap sanitasi, dan mengembangkan infrastruktur, Staf Teritorial Kodam V/Brawijaya memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan ketahanan wilayah. Selain itu, untuk meningkatkan hubungan antara TNI dan masyarakat dan menanamkan cita-cita nasional pada anak-anak di usia muda, proyek-proyek kreatif seperti "Satu Sekolah Satu Babinsa" dan "Kampung Pancasila" telah diimplementasikan. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam inisiatif bela negara dan pendidikan nasional melalui strategi Nawa Bhakti Satya dengan program Jatim Berkah dan Jatim Harmoni. Inisiatif-inisiatif ini, yang mencakup pembangunan infrastruktur, kampanye sosial, dan pelatihan, dimaksudkan untuk



meningkatkan kohesivitas sosial, mengurangi kemungkinan konflik sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dengan melibatkan tokoh masyarakat, kelompok nirlaba, dan sektor komersial, Kesbangpol Provinsi Jawa Timur juga secara aktif mengelola program-program pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara. Melalui kerja sama, seminar, pelatihan bela negara, kampanye sosial, dan edukasi berkelanjutan, Kesbangpol, DPRD, dan pihak-pihak lain dapat meningkatkan pengetahuan bela negara di kalangan aparat dan masyarakat. Untuk memastikan bahwa tujuan tercapai, meningkatkan efektivitas program, dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, program-program ini menjalani evaluasi berkelanjutan. Hal ini membuat mereka lebih tangguh dalam menghadapi rintangan dan bahaya terhadap negara. Selain itu Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2021 menugaskan Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk mengembangkan kebijakan perencanaan dan memberikan bantuan teknis, terutama dalam memperkuat domain pertahanan seperti ideologi, intelijen nasional, dan bela negara. Meskipun disepakati bahwa inisiatif wawasan kebangsaan telah berjalan dengan baik, penilaian dan evaluasi terhadap keberhasilan program pemberdayaan wilayah militer masih memiliki kesenjangan.. Agar program pemberdayaan wilayah pertahanan dapat memberikan kontribusi terbaik dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bela negara dan mendorong stabilitas nasional, maka diperlukan alat evaluasi dan penilaian yang lebih tepat.

## **B. Regulasi dan Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan**

Secara garis besar dalam pernyataan yang diberikan oleh para subyek penelitian bahwa efektivitas kampanye untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bela negara dan memperkuat stabilitas nasional di Provinsi Jawa Timur sebagian besar bergantung pada peraturan dan kebijakan. Dengan mengintegrasikan faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan keamanan, kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan provinsi ini berupaya meningkatkan kesadaran bela negara. Dalam rangka mengintegrasikan kepentingan pertahanan dalam rencana pembangunan daerah, Kodam V/Brawijaya berpartisipasi dalam sejumlah forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkat, dari desa hingga provinsi, dan memainkan peran penting dalam perumusan dan implementasi peraturan yang mendukung tujuan ini. Selain itu, Kodam V/Brawijaya juga terlibat dalam pembuatan peraturan daerah, seperti UU Nomor 3 tahun 2002 dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memfasilitasi pemberdayaan wilayah pertahanan sesuai dengan kerangka hukum yang relevan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Kodam V/Brawijaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dalam pengembangan kebijakan melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, penegak hukum, kejaksaan, dan DPRD. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan lokal dan sesuai dengan hukum Nasional. Selain itu, Kodam V/Brawijaya mengawasi penegakan aturan, seperti menginstruksikan pemerintah daerah untuk memasukkan kepentingan pertahanan dalam perencanaan tata ruang untuk mencegah konflik peraturan antara pemerintah Pusat dan daerah.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 tahun 2011, Kodam V/Brawijaya telah melaksanakan sejumlah inisiatif pengembangan masyarakat, termasuk pendidikan bela negara dan meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui organisasi seperti Pramuka dan Komponen Cadangan (Komcad). Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman eksternal dan internal. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan pertahanan teritorial, Kodam juga berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dalam sejumlah inisiatif Nota Kesepahaman (MoU), seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan ketahanan pangan. Koherensi dan konsistensi kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan semakin didukung oleh upaya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Hukum dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sebagai bagian dari proses harmonisasi, peraturan yang sudah ketinggalan zaman direvisi, celah hukum ditemukan, dan Undang-Undang yang berlaku saat ini ditinjau ulang untuk mendukung pertumbuhan wilayah pertahanan dan stabilitas nasional.

Upaya ini menyoroti betapa pentingnya pendekatan strategis dalam pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian kebijakan untuk menjamin tercapainya program pemberdayaan wilayah pertahanan di Jawa Timur. Temuan terakhir menunjukkan bahwa sejauh mana peraturan dan regulasi memberdayakan wilayah pertahanan menentukan tingkat keterlibatan masyarakat dalam program bela negara di Jawa Timur. Masyarakat yang memiliki peraturan yang jelas lebih mungkin untuk mematuhi dan secara aktif berpartisipasi dalam berbagai inisiatif karena mereka menyadari bahwa itu adalah tanggung jawab konstitusional mereka untuk menjaga stabilitas nasional.

Selain itu terkait Bappeda Provinsi Jawa Timur, regulasi terkait pemberdayaan wilayah pertahanan dalam meningkatkan kesadaran bela negara masih dalam tahap pengembangan dan kurang spesifik. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 82 Tahun 2021 mengatur tugas dan fungsi Bappeda dalam penyusunan kebijakan serta pemberian dukungan teknis di bidang perencanaan. Namun, belum ada kebijakan yang secara tegas mengatur pemberdayaan wilayah pertahanan, terutama terkait kesadaran bela negara. Ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk penyusunan kebijakan yang lebih fokus dan terarah. Kebijakan ini harus mencakup pembuatan regulasi yang jelas terkait pemberdayaan wilayah pertahanan, pelaksanaan inisiatif bela negara, serta evaluasi keberhasilannya. Tanpa regulasi yang kuat, upaya pemberdayaan dan peningkatan kesadaran bela negara di wilayah pertahanan tidak akan optimal, sehingga menghambat kontribusi Jawa Timur dalam mendukung stabilitas nasional.

### **C. Implementasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan**

Secara garis besar dalam pernyataan yang diberikan oleh para subyek penelitian bahwa pemberdayaan wilayah pertahanan dilakukan oleh Kodam V/Brawijaya melalui sejumlah program yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran bela negara. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan satuan TNI lainnya. Evaluasi berkala dilakukan untuk memverifikasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Kodam V/Brawijaya mengambil langkah unik dalam meningkatkan kerja sama dengan elemen masyarakat melalui interaksi sosial dengan berbagai kelompok masyarakat, pegawai negeri, dan sektor korporasi. Teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk meningkatkan jumlah informasi yang tersedia tentang pemberdayaan di wilayah militer.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur memainkan peran penting dalam memungkinkan kemajuan dan pelaksanaan program pemberdayaan wilayah pertahanan dengan merumuskan kebijakan dan mengalokasikan dana untuk mendukung berbagai kegiatan. Selain itu, Sekda juga memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut mendukung tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bela negara. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memaksimalkan penggunaan media digital dan media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong keterlibatan aktif masyarakat, dan menyebarkan informasi tentang kegiatan bela negara. Secara berkala, pelaksanaan program pemberdayaan wilayah pertahanan dievaluasi untuk mengetahui dampaknya. Sejumlah pihak terkait, termasuk sektor komersial, berpartisipasi dalam proses evaluasi ini. Penerapan pemberdayaan wilayah pertahanan telah menghasilkan peningkatan hubungan sosial di Provinsi Jawa Timur, persatuan dan kesatuan, dan rasa patriotisme yang lebih besar. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan, peluang pengembangan, dan pencapaian dalam memperkuat wilayah pertahanan di Jawa Timur.

Bappeda Provinsi Jawa Timur dengan mengendalikan penggunaan lahan di kawasan pertahanan dan keamanan (Hankam) dan menegakkan keseimbangan dengan kawasan budidaya dan kawasan lindung, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menggabungkan pelaksanaan pemberdayaan kawasan pertahanan di Provinsi Jawa Timur. Taktik ini mencakup pengaturan pemisahan yang aman, pengelolaan penggunaan ruang, dan memperhitungkan lokasi-lokasi yang rawan bencana. Meskipun strategi ini telah dipraktikkan melalui koordinasi lintas sektoral dengan instansi TNI dan Kementerian Pertahanan, RTRW tidak memuat peraturan

khusus tentang peningkatan kesadaran bela negara bagi warga sipil. Oleh karena itu, untuk meningkatkan stabilitas nasional dan meningkatkan kesadaran bela negara, diperlukan lebih banyak kebijakan yang lebih berpusat pada isu-isu sosial.

#### **D. Kondisi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan**

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan penting mengenai kondisi dan efektivitas pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilaksanakan oleh Kodam V/Brawijaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil awal, program pemberdayaan wilayah pertahanan Kodam V/Brawijaya, yang dilakukan bersama dengan pemerintah provinsi, telah berhasil dalam beberapa hal. Kesehatan anak-anak di Jawa Timur telah meningkat sebagai hasil dari inisiatif-inisiatif ini, yang meliputi program pengurangan stunting, konseling gizi, dan distribusi bantuan makanan padat gizi. Tujuan dari prosedur verifikasi data adalah untuk memastikan bahwa setiap kesimpulan yang diambil didukung oleh data lapangan yang dapat dipercaya. Verifikasi data hasil program pengurangan stunting, misalnya, menunjukkan dampak intervensi yang menguntungkan bagi kesehatan anak. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program pendidikan nasional dan inisiatif bela negara, seperti Jatim Berkah dan Jatim Harmoni, mendukung kesimpulan bahwa upaya-upaya tersebut telah efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan bela negara. Temuan penelitian ini menekankan betapa pentingnya inisiatif pemberdayaan daerah untuk menggabungkan pertimbangan militer dan sosio-ekonomi. Dengan memanfaatkan perpaduan antara strategi militer dan inisiatif sosial-ekonomi yang dikelola secara kolaboratif, Kodam V/Brawijaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan dampak yang penting dalam meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat dan memperkuat ketahanan daerah.

Strategi terpadu antara Kodam V/Brawijaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berhasil meningkatkan kesadaran bela negara dan menjaga stabilitas nasional, menurut kesimpulan penelitian yang didasarkan pada pemeriksaan data kualitatif. Tujuan penelitian ini didukung oleh temuan-temuan yang juga memberikan kesimpulan yang kredibel dan valid. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa inisiatif pemberdayaan wilayah pertahanan, yang dilakukan oleh Kodam V/Brawijaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan penekanan pada integrasi program militer dan sosio-ekonomi, telah memperkuat stabilitas nasional dan meningkatkan kesadaran bela negara.

Penelitian terdahulu yang berfokus pada Peran Kodim 0506/Tangerang dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan untuk Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2020 menyoroti pentingnya memaksimalkan pemberdayaan wilayah pertahanan dalam menghadapi hambatan keamanan yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang mencakup prosedur observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kodim 0506/Tangerang telah memperkuat wilayah pertahanan dengan kehadiran staf yang terampil dan berpengalaman luas sebagai bagian dari persiapan yang matang. Meskipun ada beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan, dana yang dialokasikan cukup memadai. Pentingnya kerja sama antara Kodim, Polres, dan pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan pilkada serentak semakin disoroti dalam penelitian ini.

Pentingnya memaksimalkan pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan kesamaan utama antara tesis ini dan penelitian-penelitian sebelumnya. Tesis ini dan penelitian sebelumnya menggarisbawahi pentingnya kerja sama di antara berbagai pemangku kepentingan, seperti militer dan pemerintah daerah, dalam menegakkan keamanan dan ketertiban umum yang stabil. Namun terdapat perbedaan dalam cakupan geografis dan fokus pembahasan. Tesis ini mencakup seluruh provinsi Jawa Timur, sedangkan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada peran Kodim 0506/Tangerang dalam konteks pengamanan pilkada serentak di wilayah Tangerang. Tesis ini melihat bagaimana Kodam V/Brawijaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah meningkatkan ketahanan daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bela negara melalui berbagai program pemberdayaan yang mencakup pembangunan infrastruktur,



pengentasan kemiskinan, dan penciptaan proyek-proyek inovatif seperti “Kampung Pancasila” dan “Satu Sekolah Satu Babinsa.” Temuan penelitian untuk tesis ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi, TNI, dan aktor-aktor masyarakat lainnya, seperti tokoh masyarakat, organisasi nirlaba, dan sektor swasta, semuanya telah terlibat dalam kondisi pemberdayaan pertahanan di Jawa Timur melalui berbagai tindakan yang komprehensif dan bervariasi. Program-program seperti Jatim Berkah dan Jatim Harmoni dari Nawa Bhakti Satya menunjukkan bagaimana upaya-upaya metodis dapat dilakukan untuk meningkatkan kohesi sosial, mengurangi kemungkinan konflik sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin keberhasilan program dan adaptasi program terhadap kebutuhan masyarakat setempat, evaluasi berkelanjutan juga dilakukan. Hal ini membuat program-program tersebut menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan dan bahaya yang dihadapi bangsa. Oleh karena itu, meskipun tesis ini dan penelitian sebelumnya sepakat tentang pentingnya memperkuat wilayah pertahanan, tesis ini mengambil pendekatan yang lebih komprehensif terhadap masalah ini, dengan memeriksa seluruh wilayah Jawa Timur dan berbagai inisiatif strategis yang mewakili keragaman kondisi dan tantangan di wilayah tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Teori Keamanan Nasional yang dikemukakan oleh Barry Buzan. Buzan memperluas definisi keamanan untuk mencakup tidak hanya ancaman militer tetapi juga aspek politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan, di samping keterlibatan aktor-aktor non-negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kodam V/Brawijaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berhasil mengimplementasikan inisiatif pemberdayaan wilayah pertahanan melalui program-program seperti pembangunan infrastruktur, inisiatif pendidikan nasional, dan pengurangan stunting. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang diambil tidak terbatas pada aspek militer. Keamanan nasional, dalam pandangan Buzan, adalah istilah yang memerlukan interaksi dinamis antara berbagai aktor dan sektor. Temuan penelitian ini mendukung analisis Buzan dengan menunjukkan bahwa keamanan dapat ditegakkan tidak hanya dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan strategi sosio-ekonomi dan kerja sama tim yang menggabungkan berbagai aspek masyarakat. Langkah-langkah pengurangan stunting dan program bela negara seperti Jatim Berkah dan Jatim Harmoni, misalnya, menunjukkan bagaimana peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak dan kesadaran nasional, secara langsung berkontribusi pada ketahanan secara keseluruhan di wilayah tersebut. Hal ini konsisten dengan teori Buzan bahwa bidang sosial dan ekonomi memainkan peran penting dalam konsep keamanan yang lebih besar.

Dari perspektif praktis, temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting di lapangan. Pendekatan yang menggabungkan perawatan kesehatan dengan pemberian bantuan makanan padat gizi dapat segera meningkatkan kondisi kesehatan penduduk, terutama anak-anak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil verifikasi data pada program pengurangan stunting. Hal ini menunjukkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan kualitas hidup dalam konteks strategi keamanan yang lebih besar dapat menjadi sangat penting untuk meningkatkan ketahanan nasional. Pelaksanaan inisiatif yang menangani masalah ekonomi dan kesehatan menunjukkan bahwa langkah-langkah untuk menegakkan keamanan harus mencakup tidak hanya militerisasi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kolaborasi lintas sektor, terutama melalui kampanye sosial, pendidikan, dan infrastruktur, dapat meningkatkan kesadaran bela negara, menurut sebuah penelitian tentang keterlibatan berbagai segmen masyarakat dalam pendidikan nasional dan kegiatan bela negara. Keterlibatan beberapa pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor korporat, menunjukkan keefektifan pendekatan keamanan multisektoral dalam menangani berbagai ancaman, termasuk ancaman non konvensional seperti ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kodam V/Brawijaya menunjukkan betapa pentingnya melibatkan aktor-aktor non-negara dalam rencana keamanan yang menyeluruh. Hal ini menekankan betapa pentingnya untuk mempertahankan keamanan nasional melalui strategi inklusif dan kooperatif yang tidak hanya mencakup kekuatan militer tetapi juga pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan komprehensif terhadap strategi keamanan dan memvalidasi teori Buzan tentang keamanan nasional yang melibatkan banyak aktor dan sektor. Implikasi dari penelitian ini menyiratkan bahwa taktik militer dan sosio ekonomi yang terintegrasi akan lebih berhasil dalam mengatasi berbagai tantangan yang kompleks dan meningkatkan ketahanan suatu negara dari waktu ke waktu.

### **E. Regulasi dan Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan**

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang dan kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan Provinsi Jawa Timur berlandaskan pada hukum. Hal ini mencakup berbagai kebijakan dan hukum daerah yang dikendalikan secara resmi yang meningkatkan kesadaran bela negara dan inisiatif pertahanan daerah. Strategi ini didukung oleh peraturan hukum yang ketat, seperti yang ditunjukkan oleh bukti spesifik seperti Nota Kesepahaman (MoU) yang berkaitan dengan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni), Pendidikan, dan Ketahanan Pangan. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan militer (Kodam V/Brawijaya) menunjukkan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan secara nyata dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Penelitian ini menemukan bahwa Kodam V/Brawijaya, pemerintah provinsi, dan masyarakat sipil bekerja sama secara erat untuk mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan pertahanan daerah. Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani merupakan bukti kerja sama multisektoral yang diperlukan untuk memperkuat pertahanan daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pertahanan nasional. Partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan, seperti Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), memvalidasi komitmen untuk meningkatkan kewenangan wilayah pertahanan. Kerja sama ini menunjukkan strategi yang terkoordinasi dan inklusif untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga dan memperkuat stabilitas nasional. Hasil penelitian ini memvalidasi bahwa untuk mencapai tujuan pertahanan strategis nasional diperlukan kerja sama antara militer, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini meningkatkan pengetahuan publik tentang pertahanan negara sekaligus membantu pemberdayaan wilayah pertahanan. Strategi yang menggabungkan banyak sektor dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan akan meningkatkan keefektifannya dan memperkuat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga keseimbangan nasional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang ada saat ini secara umum sudah baik, peraturan itu tetap memerlukan penguatan dan adaptasi terhadap tuntutan dan kesulitan baru. Untuk memaksimalkan pemberdayaan area pertahanan, kolaborasi perlu dipromosikan dan diperluas. Daerah-daerah lain yang menghadapi masalah yang serupa dapat melihat model kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan yang telah diterapkan oleh Jawa Timur. Pendekatan inklusif dan kolaborasi multisektoral yang digunakan di Jawa Timur dapat direplikasi oleh daerah lain untuk meningkatkan efektivitas strategi pertahanan. Hasil-hasil penelitian ini menawarkan landasan untuk penelitian tambahan tentang kemampuan kebijakan pertahanan dan petunjuk untuk pembuatan kebijakan di masa depan yang lebih efektif. Mempertahankan relevansi dan kemampuan kebijakan dalam meningkatkan stabilitas nasional akan membutuhkan penilaian dan modifikasi yang berkelanjutan sebagai tanggapan terhadap temuan-temuan penelitian

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang yang mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di Provinsi Jawa Timur memiliki dasar yang kuat dan menggabungkan berbagai pemangku kepentingan dalam pendekatan multisektoral. Dalam kerangka kebijakan pertahanan dan keamanan nasional, strategi ini mendorong kesadaran yang lebih besar akan bela negara dan stabilitas nasional, sehingga dapat menjadi model yang berguna bagi daerah lain. Wawasan penting tentang bagaimana Kodim, Polres, dan pemerintah daerah mempersiapkan diri dan berkolaborasi selama Pilkada Serentak 2020 berasal dari penelitian sebelumnya yang berkonsentrasi pada peran Kodim 0506/Tangerang dalam memberdayakan wilayah pertahanan. Melalui penggunaan metode kualitatif seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen, ditemukan bahwa Kodim 0506/Tangerang mampu membentengi wilayah





pertahanan dengan individu-individu yang kompeten dan berpengalaman meskipun menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kendala keuangan. Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya berbagai pihak untuk bekerja sama secara efektif dalam hal keamanan pemilu.

Sebaliknya, penelitian ini bertujuan untuk mempromosikan stabilitas nasional dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bela negara dengan mengatur strategi pemberdayaan wilayah pertahanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang dan kebijakan Provinsi Jawa Timur memiliki dasar hukum yang kuat dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, seperti Kodam V/Brawijaya, pemerintah provinsi, dan masyarakat sipil. Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan undang-undang lokal seperti UU Nomor 3 tahun 2002 dan UU Nomor 32 tahun 2004 serta keterlibatan Kodam V/Brawijaya dalam forum Musrenbang sangat penting dalam mempromosikan pemberdayaan wilayah pertahanan. Untuk menjamin bahwa kebijakan-kebijakan tersebut dijalankan, Kodam V/Brawijaya dan Pemerintah Provinsi juga bekerja sama dengan berbagai mitra. Penekanan pada pentingnya pemberdayaan wilayah pertahanan dan kerja sama antara berbagai pihak merupakan hal yang disetujui oleh penelitian saat ini dan sebelumnya. Keduanya menyatakan bahwa pencapaian tujuan keamanan dan stabilitas tergantung pada militer, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil yang bekerja sama secara efektif. Di sisi lain, fokus dan cakupan penelitian ini sangat bervariasi. Penelitian saat ini mencakup seluruh provinsi Jawa Timur dan berfokus pada peraturan dan kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan, sedangkan penelitian sebelumnya terutama berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pengamanan pilkada di tingkat lokal. Selain itu, metodologi yang digunakan juga berbeda, di mana penelitian saat ini menggunakan teknik Miles dan Huberman dan penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif.

Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya reformasi dan harmonisasi peraturan dalam mempromosikan stabilitas nasional dan pemberdayaan pertahanan teritorial. Menurut penelitian terbaru, kerja sama multisektoral dan kebijakan yang konsisten dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam inisiatif keamanan negara dan kesadaran bela negara. Pelajaran dari kedua penelitian tersebut dapat digabungkan untuk menciptakan kebijakan yang lebih lengkap dan efektif dalam berbagai skenario. Hasil-hasil ini dapat digunakan sebagai model untuk mengembangkan program pemberdayaan wilayah pertahanan di daerah lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Provinsi Jawa Timur dalam memberdayakan wilayah pertahanan memiliki landasan legislatif yang kuat dan dilaksanakan melalui kolaborasi multisektoral antara Kodam V/Brawijaya, pemerintah provinsi, dan masyarakat sipil. Penggunaan teori Good Governance dalam penelitian ini sangat dipengaruhi oleh temuan-temuan ini, terutama dalam hal akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, transparansi, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan, penegakan hukum, perspektif strategis, kemampuan beradaptasi, dan orientasi pada konsensus. Filosofi Good Governance yang baik menyatakan bahwa perilaku yang adil, efektif, dan transparan diperlukan agar semua pemangku kepentingan dapat terlibat dalam pengelolaan yang baik. Temuan penelitian ini memberikan dukungan terhadap gagasan ini dengan menunjukkan bagaimana kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan Provinsi Jawa Timur secara adil dan terbuka melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk melalui Nota Kesepahaman yang membahas isu-isu seperti ketahanan pangan, pendidikan, dan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Sejalan dengan gagasan Good Governance tentang keterlibatan masyarakat, militer dan pemerintah daerah berkolaborasi dalam forum Musrenbang dan membuat peraturan daerah, yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Penelitian ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi kebijakan yang diberlakukan di Jawa Timur, yang menunjukkan dasar hukum yang kuat dan implementasi yang sangat baik. Hal ini terbukti dalam temuan analisis data yang dilakukan sesuai dengan metodologi Miles dan Huberman, yang memvalidasi bahwa kebijakan-kebijakan tersebut berhasil diterapkan untuk meningkatkan stabilitas nasional dan meningkatkan pengetahuan bela negara. Fokus pada efektivitas dan efisiensi dalam mengimplementasikan kebijakan sejalan dengan cita-cita Good Governance, yang mendorong peningkatan layanan publik dan penggunaan sumber daya yang efisien.



Hasil penelitian ini juga menunjukkan betapa pentingnya menegakkan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti yang dinyatakan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelesaian yang dilakukan oleh Kodam V/Brawijaya dan pemerintah provinsi menunjukkan ketaatan pada peraturan dan regulasi yang mempromosikan pertahanan teritorial. Prinsip ini menjamin bahwa kebijakan diterapkan dan mematuhi kerangka hukum yang berlaku. Dari sudut pandang strategis, penelitian ini menunjukkan bagaimana kebijakan penguatan wilayah pertahanan di Jawa Timur mempertimbangkan masa depan dengan memasukkan berbagai faktor sosial, politik, ekonomi, dan keamanan. Hal ini sesuai dengan cita-cita Good Governance, yang mengharuskan adanya perencanaan dan pengambilan keputusan yang strategis.

Selain itu, pembangunan konsensus dan fleksibilitas terlihat jelas dalam cara kebijakan diimplementasikan. Menurut penelitian, Kodam V/Brawijaya dan pemerintah daerah berkolaborasi untuk memodifikasi kebijakan sebagai tanggapan terhadap perubahan situasi dan kebutuhan lokal. Partisipasi beberapa pemangku kepentingan, seperti penegak hukum dan DPRD, mengindikasikan adanya upaya untuk mencapai kesepakatan dalam proses pembuatan kebijakan, sejalan dengan prinsip-prinsip Good Governance yang mengedepankan konsensus. Konsekuensi praktis dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stabilitas nasional dan kesadaran bela negara dapat ditingkatkan melalui pendekatan multisektoral yang terintegrasi untuk pemberdayaan wilayah pertahanan. Penelitian ini menawarkan wawasan yang berharga tentang cara-cara kerja sama antara militer, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dapat dimaksimalkan untuk mencapai tujuan strategi pertahanan. Penelitian ini juga membangun dasar yang kuat untuk pembuatan kebijakan yang sebanding di bidang lain. Hasilnya dapat berfungsi sebagai panduan untuk kebijakan pemberdayaan wilayah militer di masa depan, yang dapat menggabungkan wawasan dari teori Good Governance untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance.

#### **F. Implementasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan wilayah pertahanan yang dikelola Kodam V/Brawijaya telah secara signifikan meningkatkan pemahaman masyarakat Jawa Timur tentang bela negara. Untuk mencapai hasil ini, diperlukan kerja sama yang erat antara TNI, masyarakat, dan organisasi terkait. Masyarakat yang berpartisipasi menunjukkan kesadaran yang lebih besar akan kewajiban mereka dalam menegakkan stabilitas dan kedaulatan negara mereka. Meskipun demikian, penelitian ini juga menyoroti beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan inisiatif pemberdayaan wilayah pertahanan. Salah satu kendala terbesar adalah kurangnya sumber daya personel dan anggaran, yang berdampak pada efektivitas dan keberlanjutan program. Selain itu, mendorong lebih banyak keterlibatan masyarakat dapat menjadi tantangan, terutama di tempat-tempat dengan tingkat partisipasi yang rendah atau pengetahuan yang minim tentang bela negara.

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi data, yang membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti catatan pemerintah dan kuesioner, untuk mengonfirmasi keabsahan temuan. Fakta bahwa data dari berbagai sumber ini konsisten menunjukkan bahwa kesimpulan penelitian ini dapat diandalkan dan sah. Dengan memasukkan informasi dari berbagai sudut pandang dan mengurangi bias yang mungkin timbul karena hanya mengandalkan satu jenis data, strategi ini meningkatkan validitas temuan penelitian. Kesimpulan analisis menunjukkan bahwa program pemberdayaan wilayah pertahanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berhasil dalam meningkatkan stabilitas regional dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai bela negara, terlepas dari sejumlah kendala, termasuk sumber daya yang langka dan kesulitan dalam membina keterlibatan masyarakat yang lebih besar. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektoral dan taktik inklusif dalam mencapai tujuan pertahanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, temuan penelitian ini menyajikan sudut pandang baru yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk meningkatkan dan menciptakan inisiatif pemberdayaan sektor militer yang baru. Selain itu penelitian ini juga memberikan saran untuk meningkatkan sumber



daya yang sudah ada dan meningkatkan inisiatif pelibatan masyarakat dalam program bela negara. Untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan pertahanan dan stabilitas nasional, hal ini memerlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat sipil serta memastikan adanya dukungan kebijakan yang tepat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan saran untuk meningkatkan sumber daya yang sudah ada dan meningkatkan inisiatif pelibatan masyarakat dalam program bela negara. Untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan pertahanan dan stabilitas nasional, hal ini memerlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat sipil serta memastikan adanya dukungan kebijakan yang tepat.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan bela negara, penelitian ini mengkaji bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan pemberdayaan wilayah pertahanan. Penelitian ini mendukung sejumlah penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya pemberdayaan wilayah pertahanan dalam strategi pertahanan nasional Indonesia secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilakukan oleh Kodam V/Brawijaya melalui berbagai program dirancang untuk meningkatkan kesadaran bela negara. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan satuan TNI lainnya, telah menunjukkan bahwa sinergi lintas sektoral menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pemberdayaan wilayah pertahanan. Hasil ini mendukung temuan dalam jurnal-jurnal terdahulu yang menunjukkan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak untuk mengoptimalkan pemberdayaan wilayah pertahanan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung terbatas pada konteks pertahanan laut, yaitu (Jurnal dari Amelia Fatimah, Lukman Y. Prakoso, Aries Sudiarso tahun 2021 dengan judul strategi pertahanan laut Indonesia melalui pemberdayaan wilayah pertahanan laut., Jurnal dari Achmad Bastari, TSL Toruan, Suhirwan tahun 2018 dengan judul Strategi pemberdayaan wilayah pertahanan laut dalam meningkatkan kesadaran bela negara di Kabupaten Tangerang, Banten (Penelitian di Lantamal III/JKT) serta Jurnal dari Putu Juli Adnyana tahun 2017 dengan judul sinergitas TNI Angkatan Laut dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui peningkatan kesadaran bela negara (Penelitian di Kelurahan Tanjung Sengkuang Pulau Batam). Penelitian ini melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, seperti pemerintah provinsi dan masyarakat luas, serta memperluas cakupannya hingga mencakup wilayah daratan Provinsi Jawa Timur. Melalui peran Sekretaris Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan pendanaan dan kebijakan yang sesuai untuk membantu inisiatif pemberdayaan ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menggunakan media digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya bela negara. Penilaian secara berkala juga dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai, yang mengindikasikan pendekatan yang lebih terorganisir dan metodis dalam pelaksanaan program. Dengan menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektoral dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan dampak program pemberdayaan, penelitian ini secara signifikan memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pemberdayaan wilayah militer. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesadaran bela negara dan stabilitas nasional, pemberdayaan masyarakat harus melibatkan strategi kerja sama dan keterlibatan semua pihak, bukan hanya personel militer, Pemerintah daerah dan masyarakat umum juga harus dilibatkan.

Kesimpulan Penelitian ini menunjukkan efektivitas program pemberdayaan pertahanan daerah yang diawasi oleh Kodam V/Brawijaya di Jawa Timur, yang didukung oleh Sekda dan Kesbangpol. Program ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan bela negara, mendorong kerja sama yang lebih besar antara masyarakat dan TNI, serta meningkatkan stabilitas daerah. Sudut pandang pluralis dari Teori Pemberdayaan Masyarakat Jim Iffe, yang memandang pemberdayaan sebagai proses yang membuat masyarakat lebih kompetitif dalam partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dan politik, didukung oleh temuan ini. Keberhasilan program ini menunjukkan bagaimana masyarakat yang diberdayakan dapat bersaing secara lebih adil, yang meningkatkan stabilitas dan mendorong kerja sama yang lebih besar antara TNI dan masyarakat sipil. Namun hasil ini juga menunjukkan penerapan teori pemberdayaan yang bersifat



strukturalis dan elitis. Melalui program ini, masyarakat diberdayakan untuk berpartisipasi dalam politik dan mempelajari “aturan main”, tetapi juga bertujuan untuk mempertanyakan dan mengubah pola dominasi elit lokal. Meskipun demikian, upaya pemberdayaan ini menghadapi hambatan struktural yang lebih besar, seperti yang terlihat dari sumber daya yang terbatas dan keterlibatan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, program ini juga menyoroti perlunya menjalankan saran dari perspektif strukturalis untuk terus memberantas bentuk-bentuk ketimpangan struktural yang ada. Program ini menyoroti pentingnya modifikasi wacana dalam memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran, dalam kerangka pendekatan pascastrukturalis. Langkah awal untuk mendorong pemikiran kreatif dan kritis di dalam masyarakat dapat dilihat dari penawaran sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan yang diberikan oleh Kodam V/Brawijaya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan masyarakat dalam inisiatif pemberdayaan yang sejalan dengan filosofi poststrukturalis.

Kesadaran bahwa program pemberdayaan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat akan keamanan negara dan stabilitas regional juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengenalan Teori elemen Keamanan Manusia oleh UNDP pada tahun 1994. Program ini secara langsung mendukung berbagai aspek keamanan manusia, termasuk stabilitas politik (pembelaan hak asasi manusia dan kekebalan dari tekanan politik) dan keamanan masyarakat (identitas budaya dan tradisi yang terpelihara), melalui peningkatan kesadaran bela negara dan menumbuhkan kerja sama antara masyarakat dan TNI. Peningkatan stabilitas regional dapat mengurangi risiko terhadap keamanan komunal, pribadi, dan ekonomi, serta meningkatkan keamanan dan ketahanan masyarakat terhadap gangguan yang tidak direncanakan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan beberapa keterbatasan, seperti pendanaan yang tidak memadai dan keterlibatan masyarakat yang membutuhkan pengembangan. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan dengan inisiatif untuk memperkuat keamanan manusia melalui pemberdayaan masyarakat, akses masyarakat terhadap sumber daya harus ditingkatkan, dan kemampuan kelembagaan harus diperkuat untuk menangani risiko yang tidak terduga. Hal ini konsisten dengan gagasan keamanan manusia, yang melihat inisiatif pembangunan sebagai sesuatu yang bergantung pada pertahanan terhadap ancaman yang sedang berlangsung dan ancaman sporadis.

Implikasi dari temuan ini di lapangan mencakup perlunya terus memperkuat pendekatan inklusif dan kolaboratif dalam program pemberdayaan masyarakat. Dengan memperhatikan keterbatasan yang ada, seperti sumber daya yang terbatas dan rendahnya keterlibatan masyarakat, program ini memerlukan perencanaan yang lebih baik untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan melibatkan lebih banyak pihak dalam pelaksanaannya. Selain itu, hasil penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan strategi lintas sektoral untuk meningkatkan kesadaran bela negara dan mendorong stabilitas di wilayah tersebut. Integrasi dukungan yang lebih kuat dari pemerintah daerah seperti Sekda dan Kesbangpol dengan inisiatif pemberdayaan TNI diperlukan untuk menjamin bahwa semua anggota masyarakat dapat terlibat dalam partisipasi aktif dan memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang. Agar lebih berhasil mencapai tujuan pertahanan dan kesejahteraan masyarakat, inisiatif pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal dapat lebih difokuskan untuk mendorong keterlibatan yang lebih luas dan lebih dalam dari berbagai kelompok masyarakat dengan mempertimbangkan implikasi dari teori dan temuan ini.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kondisi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.**

Situasi pemberdayaan wilayah pertahanan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kodam V/Brawijaya menunjukkan kemajuan dalam mengembangkan pengetahuan bela negara untuk menjaga stabilitas nasional, menurut temuan penelitian ini. Program pengurangan stunting, inisiatif pendidikan nasional, dan program bela negara seperti “Jatim Berkah” dan “Jatim Harmoni” secara efektif menggabungkan langkah-langkah militer dan sosial ekonomi secara kooperatif,



meningkatkan kesehatan anak-anak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kohesivitas sosial. Verifikasi data lapangan menegaskan efek menguntungkan dari inisiatif-inisiatif ini dan menunjukkan bahwa pendekatan multisektoral dapat secara efektif menyelesaikan masalah keamanan non-konvensional. Berdasarkan Teori Keamanan Nasional Barry Buzan, yang mengakui peran penting berbagai aktor dan sektor dalam konsep keamanan yang lebih besar, penelitian ini juga menekankan pentingnya keterlibatan aktor-aktor non-negara, seperti masyarakat dan sektor swasta, dalam upaya menjaga keamanan nasional. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian ini menunjukkan keunggulan strategi komprehensif yang mengintegrasikan taktik militer dan sosio-ekonomi untuk meningkatkan pertahanan teritorial, meningkatkan kesadaran pertahanan negara, dan membangun stabilitas nasional jangka panjang.

### **Regulasi dan Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.**

Kesimpulan dari peneliti ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberdayakan wilayah pertahanan untuk meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat dalam upaya mendukung stabilitas nasional memiliki landasan hukum yang kuat dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui pendekatan multisektor. Nota kesepahaman (MoU) yang berkaitan dengan inisiatif seperti Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni), pendidikan, dan ketahanan pangan, yang menunjukkan kerja sama antara pemerintah daerah, Kodam V/Brawijaya, dan masyarakat sipil, merupakan salah satu peraturan yang mendukung kebijakan ini. Kemitraan ini memungkinkan untuk mengimplementasikan kebijakan secara terkoordinasi dan inklusif, memperkuat pertahanan daerah sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pertahanan negara. Hasil penelitian ini menyoroti betapa pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai pertahanan strategis nasional. Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya memperkuat peraturan dan memperluas kerja sama untuk mengatasi isu-isu baru. Penelitian ini juga menyoroti kemungkinan untuk memodifikasi model pemberdayaan wilayah pertahanan yang telah dilaksanakan di Jawa Timur untuk dijadikan model bagi daerah lain di Indonesia. Strategi ini telah menunjukkan keberhasilan dalam mendorong stabilitas nasional dan kesadaran bela negara dengan menggunakan pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, temuan Penelitian ini berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan strategi yang lebih luas dan sukses di masa depan yang akan meningkatkan keamanan regional Indonesia.

### **Implementasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.**

Menurut temuan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang diawasi oleh Kodam V/Brawijaya, telah berhasil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat umum akan keadaan negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat umum, TNI, dan organisasi-organisasi terkait harus bekerja sama secara erat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat umum akan pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat keberhasilan program, seperti rendahnya jumlah staf dan tingkat partisipasi, serta kesulitan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di daerah-daerah yang tingkat partisipasinya rendah. Teknik triangulasi data digunakan dalam penelitian ini untuk memverifikasi kebenaran hasil, menunjukkan validitas dan keandalan kesimpulan penelitian. Hasil penelitian ini juga menyoroti pentingnya strategi inklusif dan kerja sama lintas sektoral dalam mencapai tujuan pertahanan dan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif pemberdayaan wilayah pertahanan Kodam V/Brawijaya memperluas jangkauannya ke seluruh Provinsi Jawa Timur dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi dan masyarakat umum. Selain itu, pemerintah provinsi memanfaatkan media digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bela negara dan secara konsisten mengevaluasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, yang menunjukkan pendekatan yang lebih sistematis terhadap pelaksanaan program. Temuan-temuan ini mendukung teori pluralis Jim Ife tentang pemberdayaan masyarakat, yang melihat pemberdayaan sebagai sebuah proses yang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik. Temuan-temuan ini juga menunjukkan bagaimana program



pemberdayaan yang diawasi oleh Kodam V/Brawijaya telah meningkatkan kesadaran bela negara dan stabilitas daerah. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi pemberdayaan yang bersifat strukturalis dan elitis dapat diterapkan, dan bahwa mengubah narasi pemberdayaan melalui kampanye penyadaran masyarakat dan pendidikan sangatlah penting. Meskipun memiliki keterbatasan, termasuk kurangnya dana dan keterlibatan masyarakat yang perlu diatasi, program ini mendukung stabilitas politik dan keamanan masyarakat dari perspektif teori faktor keamanan manusia. Implikasi temuan ini di lapangan mencakup perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Program ini memerlukan perencanaan yang lebih baik untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk dukungan yang lebih kuat dari pemerintah daerah seperti Sekda, Kesbangpol dan Bappeda Provinsi Jawa Timur. Untuk mencapai tujuan pertahanan dan kesejahteraan masyarakat, inisiatif pemberdayaan harus mendorong keterlibatan yang lebih luas dan mendalam dari berbagai kelompok masyarakat dengan mempertimbangkan temuan dan implikasi teoritis yang telah diidentifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Kris Wijoyo Soepandji, Muhammad Farid (2018), Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 No.3.

### Internet

Annisa Medina, Pengertian Good Governance, Ciri dan Prinsipnya, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/>, diakses 17 Maret 2024

Aris, Radikalisme: Pengertian, Sejarah, Ciri-Ciri, dan Cara Menangkal, diakses 15 September 2024

Bone.go.id, Pengertian Bela Negara, <https://bone.go.id/2019/10/20/pengertian-bela-negara/>, diakses 16 September 2024

Gramedia Blog, Objek Penelitian: Pengertian, Macam, Prinsip, dan Cara Menentukannya, [https://www.gramedia.com/literasi/objek-penelitian/#google\\_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/objek-penelitian/#google_vignette), diakses 10 Maret 2024

Gramedia Blog, Latar Belakang Pertempuran Surabaya 10 November 1945, <https://www.gramedia.com/literasi/pertempuran-surabaya-10-november-1945/>, diakses 9 Maret 2024

<http://repository.stei.ac.id/2172/4/BAB%20III.pdf>, iunduh 10 Maret 2024

<https://repository.umj.ac.id/9338/12/12.%20BAB%20III.pdf>, diakses 10 Maret 2024

Hukum Online, Terorisme: Pengertian, Faktor Penyebab, dan Jenis-Jenisnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-adalah-lt6183b09848f15/> diakses 16 September 2024

Hukum Online.com, Wilayah Pertahanan, <https://www.hukumonline.com/kamus/w/wilayah-pertahanan>, diakses 16 September 2024

Imperva, Cybersecurity Threats, <https://www.imperva.com/learn/application-security/cyber-security-threats/>, diakses 16 September 2024



Kelbumi ayu, Tupoksi Babinsa, <https://kelbumiayu.malangkota.go.id/tupoksi-babinsa/>, diakses 16 September 2024

Kompasiana, Analisis Data Kualitatif Miles dan Hubermen, <https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-hubermen>, diakses 10 Maret 2024

Lawrence Leung, National Library Of medicine, Validity, reliability, and generalizability in qualitative research, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4535087/>, diakses 10 Maret 2024

Lampung Barat Kab, Musrenbang adalah wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik dan saran dari program Pemerintah, <https://lampungbaratkab.go.id/home/2022/02/09/musrenbang-adalah-wadah-masyarakat-dalam-menyampaikan-aspirasi-kritik-dan-saran-dari-program-pemerintah/>, diakses 16 September 2024

Perpustakaan Lemhannas RI, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-01160000000028/swf/1867/files/basic-html/page11.html>, diakses 27 februari 2024

### **Repository, Tinjauan Pustaka,**

[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20884/2/T1\\_372014072\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20884/2/T1_372014072_BAB%20II.pdf), diakses 1 Mei 2024

SMAN 2, Apa saja Landasan Wawasan Nusantara, <https://www.sman2-tp.sch.id/read/berita/2258/27/03/2023/apa-saja-landasan-wawasan-nusantara> diakses 27 februari 2024

Syamsul Dwi Maarif, Mengenal Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli, <https://tirto.id/mengenal-teori-pemberdayaan-masyarakat-menurut-para-ahli->, diakses 17 Maret 2024

Unida Gontor, Studi Keamanan Manusia, <https://hi.unida.gontor.ac.id/studi-keamanan-manusia>, diakses 17 Maret 2024

Yoni Ardianto, Memahami Metode Penelitian Kualitatif, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html> diakses 10 Maret 2024

Yusuf A, Desain Penelitian: Pengertian, Macam dan Contoh, <https://deepublishstore.com/blog/desain-penelitian/>, diakses 21 Maret 2024